

Peran Birokrasi Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Carocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan

Mutia Kardina¹, M. Fachri Adnan², Afriva Khaidir³

¹²³Prodi Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Padang

Email: imutiakardina@gmail.com fachri.adnan@fis.unp.ac.id
af.khaidir@fis.unp.ac.id

Abstrak

Birokrasi memiliki kelebihan seperti efisiensi, kesetaraan perlakuan, keterbukaan informasi, dan spesialisasi tugas. Namun, kekurangannya meliputi sifat kaku, impersonal, dan alienasi. Birokrasi seharusnya dijalankan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dengan pembagian kerja yang spesifik dan kompetensi teknis tinggi. Dinas Pariwisata mengelola pariwisata di seluruh objek wisata di Pesisir Selatan, termasuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata. Dinas Pariwisata bekerjasama dengan masyarakat dan pihak pemerintah untuk melakukan pengelolaan pariwisata di Pesisir Selatan. Wisata pantai Carocok di Painan dikelola oleh masyarakat, tetapi pemerintah mengatur pengembangannya. Pelatihan dan pembinaan keamanan serta keselamatan di destinasi pariwisata menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan bagi pengunjung. Birokrasi Dinas Pariwisata berperan dalam mengenalkan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah tersebut. Ini meliputi promosi destinasi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.

Kata Kunci: *Pariwisata, Birokrasi, Masyarakat*

Abstract

Bureaucracy has advantages such as efficiency, equality of treatment, information disclosure, and task specialisation. However, its disadvantages include rigidity, impersonality, and alienation. Bureaucracy should be run in a strict vertical hierarchy system with a specific division of labour and high technical competence. The Tourism Office works together with the community and the government to manage tourism in Pesisir Selatan. Carocok beach tourism in Painan is managed by the community, but the government regulates its development. Security and safety training and coaching at tourism destinations is prioritised. This demonstrates a commitment to providing a safe and enjoyable tourism experience for visitors. Bureaucracy The Tourism Office plays a role in introducing and developing tourism potential in the area. This includes destination promotion, infrastructure development, and training to improve the quality of tourism services.

Keywords: Tourism, Bureaucracy, Community

PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan struktur jabatan yang hierarkis. "Birokrasi" berasal dari kata

Prancis "bureau" dan Yunani "kratos", yang masing-masing berarti meja tulis dan pemerintahan. Ini merujuk pada kelompok orang yang bekerja di balik meja dalam pekerjaan perkantoran dan pemerintahan. (Sawir, 2020) Birokrasi memiliki ciri-ciri utama seperti hukum, hierarki, spesialisasi, kompetensi, dan netralitas. Hal ini mencakup efisiensi, kesetaraan, keterbukaan, spesialisasi, serta perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik.

Birokrasi memiliki kelebihan seperti efisiensi, kesetaraan perlakuan, keterbukaan informasi, dan spesialisasi tugas. Namun, kekurangannya meliputi sifat kaku, impersonal, dan alienasi. Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip rasionalitas dan hierarki. Birokrasi seharusnya dijalankan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dengan pembagian kerja yang spesifik dan kompetensi teknis tinggi. Konsep birokrasi Max Weber diterapkan di Indonesia dengan kelebihan dan kekurangan tertentu. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Max Weber mengembangkan model birokrasi ideal yang menjelaskan bahwa birokrasi atau administrasi memiliki struktur yang jelas di mana semua operasional berjalan secara rasional. Model ideal ini, menurut Weber, dapat digunakan untuk membandingkan birokrasi antar organisasi. Menurut pandangannya, birokrasi rasional ini beroperasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, meskipun pejabat dalam suatu birokrasi memiliki kebebasan pribadi, kebebasan tersebut dibatasi oleh peran resmi mereka. Pejabat tidak dapat memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau keluarga. Kedua, struktur jabatan dalam birokrasi diatur dalam sebuah hierarki yang tersusun dari level tertinggi ke level terendah dan melintang, menghasilkan adanya posisi-posisi atasan dan bawahan serta perbedaan dalam tingkat kekuasaan. Ketiga, setiap posisi jabatan dalam hierarki tersebut memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dan berbeda antara satu dengan lainnya. (Wakhid, 2011)

Birokrasi memainkan peranan kunci dalam administrasi publik melalui berbagai fungsi esensial. Pertama, ia berfungsi sebagai tulang punggung dalam menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Kedua, birokrasi bertindak sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Melalui struktur hierarkis dan penjabaran jenjang jabatan yang jelas, birokrasi menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diimplementasikan secara sistematis dan terorganisir.

Selanjutnya, dalam aspek pengelolaan administratif, birokrasi memiliki peran vital dalam mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada untuk mendukung pencapaian objektif pemerintah. Hal ini termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan aset-aset lainnya. Dalam konteks pengurusan informasi, birokrasi berperan sebagai pengumpul, pengolah, dan penyedia informasi yang krusial untuk pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Terakhir, birokrasi juga berfungsi dalam mengendalikan dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien guna memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. (Haning, 2018)

Dalam administrasi publik untuk pengembangan pariwisata adalah penting untuk memahami bagaimana teori administrasi publik modern dapat mempengaruhi cara mengelola birokrasi dalam sebuah organisasi publik. Teori administrasi publik modern mencakup berbagai konsep dan prinsip yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata. Salah satu konsep yang penting dalam teori administrasi publik modern adalah optimalisasi birokrasi, yang merujuk pada cara mengelola dan mengorganisasikan birokrasi dalam sebuah organisasi untuk mencapai

tujuan yang optimal. Optimalisasi birokrasi dalam administrasi public untuk pengembangan pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa tahap: Pertama, perlu dikenalkan tujuan utama dari pengembangan pariwisata, seperti meningkatkan pendapatan, memperluas pembiayaan, atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. Setelah tujuan dikenal, perlu dilakukan analisis birokrasi untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang penting dalam proses pengembangan pariwisata. Ini termasuk analisis struktur organisasi, prosedur, dan sumber daya manusia yang digunakan dalam proses ini. Setelah birokrasi dianalisis, perlu dilakukan optimalisasi proses untuk mengurangi biaya dan mengoptimalkan hasil. Ini termasuk mengidentifikasi bagian-bagian yang tidak efektif atau efisien, dan menggantinya dengan solusi yang lebih baik. Setelah proses optimalisasi selesai, perlu dilakukan implementasi dan mengidentifikasi evaluasi untuk mengidentifikasi hasil yang diperoleh dari perubahan ini. Ini termasuk bagian-bagian yang berhasil dan bagian-bagian yang perlu diperbaiki lagi. (Saima Malik, 2019)

Dalam lingkup Administrasi Publik, keberadaan model Weberian tetap relevan meskipun mendapat kritik karena dampaknya yang ambivalen, di mana model tersebut dapat meningkatkan efisiensi namun sekaligus berpotensi merusak performa. Model Weberian memandang birokrasi sebagai entitas yang terstruktur secara hierarkis dari tingkat atas hingga bawah berdasarkan pembagian wewenang yang jelas. Akan tetapi, tantangan muncul ketika model ini dipengaruhi oleh intervensi politik, yang dapat mengalihkan focus utama dari pelayanan public menjadi alat kekuasaan. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan system birokrasi dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup perubahan dalam cara kerja dan sikap para birokrat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam melayani kepentingan publik. (Haning, 2018)

Dalam era globalisasi dan persaingan antar daerah yang semakin ketat, pengembangan sector pariwisata menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor pariwisata, dengan segala potensi yang dimilikinya, dapat menjadi penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestic maupun internasional. Namun, untuk mencapai sukses dalam pengembangan pariwisata, diperlukan administrasi publik yang efektif dan efisien, khususnya dalam hal birokrasi. Birokrasi yang optimal merupakan kunci dalam implementasi kebijakan dan program pariwisata yang berhasil.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka, yakni teknik penggalian data melalui proses memahami dan mengkaji teori dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topic penelitian. Terdapat empat langkah kunci dalam pelaksanaan studi pustaka, meliputi persiapan peralatan yang dibutuhkan, penyusunan daftar pustaka untuk keperluan kerja, pengelolaan waktu secara efektif, serta kegiatan membaca atau mencatat informasi penting dari materi yang diteliti. Proses pengumpulan data dalam metode ini dilaksanakan dengan mencari dan mengonstruksi informasi dari beragam sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Materi yang diperoleh dari referensi-referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam. Tujuannya adalah untuk menguatkan proposisi dan ide-ide yang diajukan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Sejarah dan Geografi Kota Painan Pesisir Selatan

Painan adalah sebuah nagari dan kota kecil yang menjadi ibu kota dari kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini terletak di wilayah Kecamatan IV Jurai yang dapat diakses melalui Jalan Raya Lintas Sumatra bagian Barat. Secara geografis, Nagari Painan berada pada Pusat Kota Painan yaitu Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan, dengan koordinat geografis antara $100^{\circ} 32' - 100^{\circ} 47' BT$ dan $1^{\circ} 09,70' - 1^{\circ} 22,70' LS$ (K. Gramer Alandra, 2018)

Wilayah pesisir merupakan area transisi antara daratan dan laut, yang dicirikan oleh keberagaman hayati yang melimpah dan mencakup beberapa ekosistem yang sangat rentan, seperti hutan bakau dan terumbu karang. Selain itu, wilayah pesisir juga terpengaruh oleh tekanan populasi yang tinggi akibat dari laju urbanisasi yang cepat. Sebagian besar populasi dunia saat ini tinggal di wilayah pesisir yang menjadi destinasi utama bagi para wisatawan, di mana pariwisata menjadi sector ekonomi utama di daerah tersebut. (Khairunnisa, 2017)

Painan merupakan wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Painan adalah kota kecil dan nagari yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten Pesisir Selatan. Bahasa Minang, yang artinya "sangat pahit", adalah sumber nama "Painan". Frase ini menggambarkan tantangan hidup yang dihadapi oleh pendatang yang tinggal di wilayah Painan. Pada tahun 1523, sebuah surau, yang merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Minangkabau, didirikan di Painan, yang menandai pentingnya pendidikan agama di daerah tersebut.

Painan memainkan peran penting dalam sejarah colonial ketika Perjanjian Painan diprakarsai oleh Groenewegen pada tahun 1663, yang memungkinkan Belanda untuk membangun kehadiran mereka di kota Padang melalui pembukaan kantor perwakilan. Namun, ketika proposal ini ditolak oleh para pemimpin lokal di Padang, Belanda memilih untuk mendirikan kantor mereka di Painan, tepatnya di Pulau Cingkuak. Sejak saat itu, pulau ini berkembang menjadi pelabuhan internasional yang ramai. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa para pemimpin adat di pesisir Sumatera Barat harus menyediakan lada untuk para pedagang Belanda, yang menunjukkan dampak signifikan dari perjanjian ini terhadap ekonomi lokal.

Painan, sebuah kota yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Batang Pinang Gadang dan Sungai Batang Pinang Ketek, memiliki keindahan alam yang memikat dengan asal-usulnya dari Timbulun, yang terkenal dengan air terjun bertingkat tujuh. Melalui rute Timbulun, pengunjung dapat mengakses Alahan Panjang, menunjukkan koneksi alam yang indah di area tersebut. Kedua sungai tersebut mengalir kepantai Carocok dan pantai Muaro Painan, sebelum akhirnya bersatu di Teluk Painan, sebuah area yang dikenal dengan keadaannya yang tenang, dikelilingi oleh Bukit Langkisau dan Pincuran Boga. Nama "Langkisau" sendiri terinspirasi dari fenomena alam angin yang berputar di antara dua bukit yang menjaga kota Painan.

Di tengah keindahan Teluk Painan, terdapat Pulau Batu Kereta, sebuah pulau unik yang terhubung dengan daratan Painan saat air surut. Pulau ini mendapat namanya dari sebuah batu besar di puncaknya yang bentuknya mirip sepeda, atau "kereta" dalam dialek lokal. Tak jauh dari sana, hanya sekitar 800 meter, berdiri Pulau Cingkuak, sebuah pulau kecil yang dijaga oleh satu penjaga dan dihiasi oleh reruntuhan benteng Belanda, menjadikannya spot memancing dan destinasi wisata yang populer.

Lebih lanjut, di luar Pulau Cingkuak, terdapat dua pulau Aur, Pulau Aur Kecil dan Pulau Aur Besar, yang bias dicapai dalam waktu sekitar 30 menit dengan speedboat. Meskipun Pulau Aur Besar terkenal dengan cerita keraguan yang menghuninya dan tidak terbuka untuk kunjungan, keberadaannya menambah misteri dan petualangan dalam eksplorasi Painan. Selanjutnya, perjalanan sekitar 30 menit dari Pulau Aur membawa pengunjung ke Pulau Penyu, dimana ada penangkaran penyu dan tempat

peneluran penyu, serta sebuah banteng Portugis, menambah keunikan dan daya tarik historis wilayah Painan sebagai destinasi wisata.

Pengelolaan di Kawasan Carocok Painan

Pengelolaan pariwisata bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah dan memperkenalkan daya tanggap tempat wisata dan objek wisata di Indonesia, termasuk kota dan daerah. Setelah berkembangnya proses pembangunan pariwisata, pembangunan dan fasilitas untuk kemakmuran penduduk setempat dan pemerataan perdagangan dalam negeri, serta pembangunan jalan yang berorientasi pada pembangunan daerah berbasis masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat, seperti sumber daya manusia, pemasaran, tujuan, sains dan teknologi dan aspek lainnya memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kekayaan alam dan budaya lokal (Tunggul Prasodjo, 2017).

Tujuan penyelenggaraan pariwisata adalah untuk mendorong pengembangan wilayah, pengenalan dan pemanfaatan tempat dan tujuan wisata di Indonesia termasuk kota dan daerah. Pembangunan pariwisata dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan keadilan, serta menitikberatkan pada kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Pembangunan berorientasi pada pembangunan wilayah, berbasis masyarakat, dan bersifat pemberdayaan masyarakat. Hal ini cukup untuk sumber daya manusia, pasar memanfaatkan sumber daya alam dan budaya dalam pemasaran, destinasi, sains, dan teknologi (Putu Rahardjo, 2020).

Kawasan Carocok Painan awalnya merupakan pemukiman penduduk sebelum menjadi tempat wisata. Awalnya disebut "Kandang Jawi" oleh penduduk local karena biasanya digunakan untuk menambat sapi. Namun, sejak tahun 1980-an, penduduk Painan dan orang-orang di sekitarnya mulai mengunjungi tempat ini karena pemandangannya yang indah. Ini terutama berlaku saat senja, ketika pemandangan matahari terbenam jelas terlihat dari pantai. Pemerintah mulai membangun Carocok Painan pada tahun 1989, dan diperbarui pada tahun 2000. Pada tahun 2006, sebuah musala dan fasilitas lainnya dibangun, dan pada tahun 2011, pembangunan secara besar-besaran dimulai dengan pembangunan jalan yang menghubungkan ke Pantai Salido. Karena Carocok Painan dekat dengan pusat kota, yang memudahkan wisatawan untuk mencapainya, dan kondisi jalan yang baik membuatnya lebih mudah diakses. Selain itu, ada banyak sarana transportasi darat yang dapat diakses dari Padang ke Painan, yang beroperasi dari pagi hingga malam.

Peran Birokrasi Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Carocok Painan Di Kabupaten Pesisir Selatan

Pengembangan strategi pengelolaan pariwisata bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkenalkan berbagai destinasi wisata serta objek wisata yang ada di Indonesia, termasuk di berbagai kota dan daerah. Seiring dengan perkembangan industry pariwisata, upaya pembangunan infrastruktur dan fasilitas dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memperluas kesempatan perdagangan dalam negeri, serta menyediakan akses transportasi yang mendukung pembangunan daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pendekatan ini mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, strategi pemasaran, pengembangan tujuan wisata, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek lainnya yang secara efektif memanfaatkan potensi alam serta kekayaan budaya lokal. (Widya Silviana, 2020)

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki objek wisata alam, bahari, sejarah dan wisata lainnya. Mengembangkan sector pariwisata merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menghasilkan devisa. Keindahan alam dapat menunjang kelangsungan pembangunan ekonomi nasional karena dapat mengatasi

defisit neraca pembayaran dan mendorong pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian dan menghasilkan uang. Beberapa lokasi wisata utama yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah DUPK Carocok dan sekitarnya yang merupakan daerah tujuan utama, DUPK Mandeh dan sekitarnya serta DUPK Pasir Putih dan sekitarnya. Konsep destinasi pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lengkap untuk pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang menggabungkan pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan destinasi untuk mencapai keberlanjutan.

Peran birokrasi Dinas Pariwisata dalam pengembangan dan promosi pariwisata Carocok Painan meliputi:

- **Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Pariwisata**
Dinas Pariwisata mengelola pariwisata di seluruh objek wisata di Carocok Painan, termasuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan telah menyelenggarakan pelatihan tentang keamanan dan keselamatan di destinasi wisata. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta yang merupakan pengelola lokasi destinasi wisata. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari Selasa hingga Kamis tanggal 13 hingga 15 Juni 2023, di Hotel Hannah Painan. Suhendri, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, menyatakan bahwa kegiatan ini didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Basarna, BPBD Provinsi, dan praktisi pariwisata.

Tujuan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan tentang elemen keamanan dan keselamatan di tempat wisata Kabupaten Pesisir Selatan. Suhendri berterimakasih kepada semua orang yang berpartisipasi dan berharap pelatihan ini akan membantu para pebisnis destinasi wisata di daerah tersebut menjadi lebih mampu. Sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan sangat bergantung pada faktor keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk membantu bisnis pariwisata meningkatkan sumberdaya manusia pengelola wisata melalui pelatihan ini. Menurut Suhendri, di masa depan, pariwisata harus menjadi pilar ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh karena itu, Pemkab Pesisir Selatan terus mendukung upaya untuk meningkatkan SDM di sector pariwisata. Pelatihan ini juga mempersiapkan SDM di lokasi wisata agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, dengan perhatian khusus terhadap protocol kesehatan baik bagi pengelola destinasi maupun wisatawan yang berkunjung. Suhendri mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam mengembangkan sector pariwisata dan ekonomi kreatif, serta berharap pelatihan ini dapat menguatkan dasar pariwisata yang sudah dibangun, mencapai tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta melestarikan alam, budaya, dan lingkungan sekitar.

- **Pengembangan potensi pariwisata**
Strategi yang digunakan oleh dinas pariwisata digunakan untuk menunjukkan potensi lokasi dan daya tarik wisata dalam dan luar negeri. Menurut Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, pengembangan pariwisata bukanlah focus utama dari rencana pembangunan daerah. Masih terdapat kelemahan dalam sarana dan prasarana, serta sikap warga sekitar yang belum mendukung sepenuhnya. Meskipun wisatawan menerima perhatian serius, namun

kekurangan tersebut masih membuat lingkungan tidak sepenuhnya nyaman. Hal ini menunjukkan komitmen yang serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola industry pariwisata di wilayah mereka.

- **Pemberian Edukasi**

Melibatkan upaya pelestarian lingkungan, sehingga para pengunjung dapat menikmati keindahan Pantai Carocok di setiap sudutnya dengan baik. Oleh karena itu, menjaga lingkungan menjadi sangat penting. Penggunaan sumber daya secara optimal menjadi salah satu elemen krusial dalam pengembangan pariwisata dan pemeliharaan ekologi. Proses pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, sehingga keberlanjutan destinasi wisata dapat terjaga.

Carocok Painan juga memiliki warisan budaya yang penting, yang menawarkan paket seni dan budaya kepada pengunjung. Hal ini memungkinkan para wisatawan untuk menyaksikan pawai budaya leluhur yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga menghargai dan mempromosikan kekayaan budaya local sebagai bagian integral dari pengalaman wisata.

- **Pengelolaan Pariwisata dengan Kerja Sama.**

Dinas Pariwisata bekerjasama dengan masyarakat dan pihak pemerintah untuk melakukan pengelolaan pariwisata Carocok Painan. Wisata pantai Carocok Painan dikelola oleh masyarakat, tetapi pemerintah mengatur pengembangannya. Pantai Carocok terletak tepat di bawah Bukit Langkisau. Meskipun pasirnya agak kasar, pasirnya sangat bersih dan putih, dan airnya jernih. Pulau Kereta dan Pulau Cingkuak adalah dua pulau yang terlihat dari kejauhan dari Pantai Carocok. (Iranty Ranggeni, 2017)

Pemerintah setempat juga membentuk organisasi bernama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mengelola operasional. Mereka memberikan bimbingan dan motivasi kepada pengelola lokal, serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pariwisata. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa memiliki dan ikut berperan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Salah satu bentuk upaya melibatkan masyarakat adalah dengan mengadakan sosialisasi yang mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam pengembangan pariwisata, dengan harapan menarik lebih banyak wisatawan. (Widya Silviana, 2020)

Pada tahap pengelolaan, focus tetap diberikan pada destinasi wisata dengan membentuk system organisasi yang mengatur pengelolaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selama ini, pembangunan pariwisata berkelanjutan telah berhasil mengurangi tingkat pengangguran dengan memberdayakan masyarakat, sambil tetap menghormati dan memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisional yang diwarisi dari leluhur, serta melindungi warisan budaya dan nilai-nilai tradisional dari tergerusnya dampak perkembangan zaman. Tentunya, pariwisata juga memainkan peran penting dalam memelihara toleransi dan pemahaman antarsuku dan budaya. Ketentuan yang tercantum dalam 'Kode Etik Pariwisata' menegaskan bahwa pariwisata bukan hanya

pengguna, tetapi juga contributor dalam memelihara warisan budaya. (Widya Silviana, 2020)

Peran birokrasi, terutama Pemerintah Daerah, memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata Pantai Carocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. Birokrasi memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di Pantai Carocok, termasuk dalam hal pengembangan atraksi, fasilitas, dan akses wisata.

Pemerintah Daerah memiliki dominasi dalam menentukan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan pariwisata Pantai Carocok. Mereka bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan, tempat parkir, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, mereka juga berperan dalam promosi pariwisata Pantai Carocok, baik secara lokal maupun internasional, untuk menarik wisatawan (Khoirunnisa, 2023).

Namun, peran birokrasi tidak hanya terbatas pada Pemerintah Daerah. Dalam pengembangan pariwisata Pantai Carocok, peran masyarakat juga sangat penting. Birokrasi perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan pengembangan pariwisata serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal diakomodasi.

Selain itu, peran birokrasi juga harus memaksimalkan keterlibatan organisasi masyarakat, seperti kelompok nelayan, kelompok seni dan budaya, dan kelompok masyarakat lainnya. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam mengelola atraksi pariwisata, memberikan pelayanan kepada wisatawan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat.

Dengan demikian, peran birokrasi dalam pengembangan pariwisata Pantai Carocok Painan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi pengelolaan dan pengembangan atraksi, fasilitas, dan akses wisata, serta peran dalam melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata (Kania, Saprudin, 2021).

SIMPULAN

Pada studi kasus Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa peran birokrasi sangatlah penting dalam berbagai aspek pengembangan pariwisata. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari peran birokrasi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Painan adalah sebagai berikut: Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Pariwisata: Pelatihan dan pembinaan keamanan serta keselamatan di destinasi pariwisata menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan bagi pengunjung. Pengembangan Potensi Pariwisata: Birokrasi Dinas Pariwisata berperan dalam mengenalkan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah tersebut. Ini meliputi promosi destinasi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Pemberian Edukasi: Upaya pelestarian lingkungan dan budaya merupakan bagian integral dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat didorong untuk menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya. Pengelolaan Pariwisata dengan Kerja Sama: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait menjadi kunci dalam pengelolaan pariwisata yang berhasil. Melalui organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata,

tetapi juga pada aspek-aspek yang mendukung keberlanjutan pariwisata, termasuk pelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya dukung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Haning, M. T. (2018, Juni). Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, Volume 4 No 1.
- Iranti Ranggeni, H. H. (2017, April). Contribution Of Pantai Carocok Painan To The Local Revenue Of The Pesisir Selatan Regency Of West Sumatera Province. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Riau*.
- Khairunnisa, T. K. (2017). Penilaian Ekonomi Wisata Pesisir Kawasan Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Volume 18 No 1.
- Saima Malik, P. J. (2019, Desember). Comparison Of Different Management Theories .
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Cv Budi Utama.
- Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Tapis*, Volume 17 No 13.
- Widya Silviana, A. M. (2020). Pengelolaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, Volume 2 No 3.
- Chris Susanto, Putu, Evan Max Ray, Diana R Indahningtyas, Vivilia Setiawan, and dan Arfah Khayat, *Peran Sektor Keempat Dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism)*
- Khairunnisa, Khairunnisa, Tridoyo Kusumastanto, and Achmad Fahrudin, 'Penilaian Ekonomi Wisata Pesisir Kawasan Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18.1 (2017), pp. 1–21, doi:10.21002/jepi.2018.01
- Prasodjo, Tunggal, *Pengembangan Pariwisata Budaya Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, *Jurnal Office*, 2017, III
- Selatan, Kabupaten Pesisir, *ABSTRAK Gramer Alandra (2018) : Persepsi Pengunjung Terhadap Sarana Dan Prasarana Rekreasi Di Pantai Carocok Paina*
- Kania, Saprudin, *Pariwisata Budaya Untuk Pelayanan Publik*, *Jurnal Office*, 2